

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Reza Novandri*, Dr. Asniati, MBA, Ak**, Drs. H. Amsal Djunid, B. Buss, Ak**

*Mahasiswa Program Studi S2 Akuntansi Pemerintahan

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

email: rezanovandri@rocketmail.com

Abstrak

E-Government merupakan instrumen reformasi birokrasi Pemerintahan dunia menuju *good governance* dan Pemerintah Indonesia telah memulai perbaikan birokrasi berbasis teknologi ditandai dengan berdirinya Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara (BAKOTAN) pada tahun 1969 dan adanya Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional namun implementasinya belum terlihat. Pemerintah Kota Pariaman menjadikan reformasi birokrasi berbasis teknologi untuk mewujudkan *good governance* sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018. Dalam penelitian terdahulu, sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) merupakan salah satu solusi tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance* namun implementasi ERP masih memiliki resiko kegagalan. Nasir dan Sahibuddin (2011) mencatat sebanyak 72,43% proyek implementasi sistem dari tahun 1994 hingga 2008 bermasalah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Pariaman dalam implementasi sistem ERP menggunakan 4 variabel yaitu infrastruktur, tingkat adopsi, sumber daya manusia dan budaya organisasi yang merupakan *Critical Success Factor* (CSF). Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan *mixed methods*, desain *embedded correlational model* dan teknik *judgement sampling* pada orientasi waktu pemilihan sampel secara bersamaan dengan hubungan sampel bertingkat. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap dengan variabel kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menggunakan analisis data dokumentasi dan deskripsi hasil wawancara, sedangkan variabel tingkat adopsi, sumber daya manusia dan budaya organisasi menggunakan statistik deskriptif data kuesioner dan deskripsi hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Pariaman telah siap mengimplementasi sistem ERP dengan potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Pada variabel kesiapan infrastruktur, lebih dari 83% infrastruktur TIK dan pendukungnya dalam kondisi layak dan baik dengan dukungan jaringan dan keamanan yang terpercaya namun masih terdapat kelemahan terkait belum optimalnya saluran layanan, tidak adanya *Disaster Recovery Center* (DRC) dan tidak tercantumnya prosedur pemeliharaan infrastruktur dalam peraturan pelaksana. Variabel tingkat adopsi berpotensi kuat karena didukung dengan dokumen pengembangan TIK yang berkekuatan hukum tetapi terdapat kelemahan dalam prosedur perencanaan yang masih belum konsisten penerapannya. Variabel sumber daya manusia memiliki potensi kekuatan karena adanya pemimpin yang dipercaya ASN dan DPRD mampu melaksanakan proyek teknologi informasi dengan baik namun kelemahannya adalah kurangnya personil berketerampilan TIK dan tidak dimanfaatkannya ASN berlatarbelakang pendidikan komputer. Variabel budaya organisasi memiliki potensi kekuatan karena kesadaran kebutuhan teknologi serta budaya kepemimpinan yang baik dan memiliki wujud nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tetapi terdapat kelemahan yaitu keengganan untuk berubah dalam waktu dekat karena berada pada zona nyaman atau ASN tersebut sulit menghilangkan kebiasaan penggunaan dokumen kertas dengan sistem manual.

Kata kunci : *Enterprise Resource Planning*, Reformasi Birokrasi, *Good Governance*, Kesiapan Organisasi

ANALYSIS OF PARIAMAN CITY GOVERNMENT READINESS ON ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM IMPLEMENTATION

Reza Novandri*, Dr. Asniati, MBA, Ak**, Drs. H. Amsal Djunid, B. Buss, Ak**

*Mahasiswa Program Studi S2 Akuntansi Pemerintahan

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

email: rezanovandri@rocketmail.com

Abstrak

E-Government is the world government instrument of bureaucracy reform towards good governance and the Indonesian government has initiated the improvement of technology-based bureaucracy signed by the establishment of the State Administration Automation Coordinating Board (BAKOTAN) in 1969 and the Presidential Decree No. 20 of 2006 on the Establishment of National Information and Communication Technology Board, but its implementation has not seen. The Pariaman City Government make bureaucratic reform based technologies for achieving good governance as a priority in the Medium Term Development Plan (RPJMD) in 2013-2018. In a previous study, Enterprise Resource Planning (ERP) is a perfect solution in reforming the bureaucracy to realize good governance but the ERP implementation is still at risk of failure. Nasir and Sahibuddin (2011) recorded as much as 72.43% of system implementation projects from 1994 to 2008 is problematic.

This study aimed to analyse the readiness of the Pariaman City Government in the ERP system implementation using 4 variables: infrastructure, the rate of adoption, human resources and organizational culture which are Critical Success Factors (CSF). This research is a case study using mixed methods, embedded correlation models design and judgment sampling techniques on the orientation of the sample selection at the same time with the relationship of a stratified sample. Data analysis technique is done in stages which are infrastructure readiness of Information and Communication Technology (ICT) variable utilize documentation data analysis and description of the interview results, while variable rate of adoption, human resources and organizational culture are using questionnaire data descriptive statistics and analysis of the interview results.

Based on this research, Pariaman City Government was ready to implement the ERP system with the potential strengths and weaknesses. In the variable infrastructure readiness, more than 83% of infrastructure and its supports in decent and good condition with network support and reliable security but there are still weaknesses related to non-optimal service channels, the absence of a Disaster Recovery Centre (DRC) and the inclusion of procedures for infrastructure maintenance in regulation implementers. Variable rate of adoption has potentially powerful because it is supported by ICT development documents legally enforceable, but there are weaknesses in planning procedures that are still inconsistent application. Variable human resources have the potential strength for their leaders who trusted by ASN and Parliament is able to implement information technology projects well, but its weakness is the lack of skilled ICT personnel and ASN which has computer educational background are not engaged. Variable culture of organization has potentially powerful because their awareness of the technology needs and the culture of good leadership and has a tangible manifestation in the implementation of bureaucratic reforms, but there is the disadvantage that the reluctance to change in the near future because they are in a comfort zone or the ASN difficult to break the habit of using paper documents with the manual system.

Keywords : Enterprise Resource Planning, Bureaucracy Reform, Good Governance, Organizational Readiness